

PELANGGARAN MAKSIM KESANTUNAN LEECH DALAM KOLOM KOMENTAR VIDEO TVONE NEWS TENTANG USULAN WFH BAGI ASN

Ardabilly J. Firdaus^{1}*

Siti Chalimatus Sa'diyah²

Karmila³

Erina Ayu Lestari⁴

Nur Lailiyah⁵

Universitas Nusantara PGRI

e-mail: [*ysfbilly1010@gmail.com](mailto:ysfbilly1010@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran maksim kesantunan yang diucapkan berdasarkan teori Leech dalam kolom komentar unggahan TikTok tvOneNews terkait wacana Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data berupa 4.259 komentar warganet pada unggahan video politik bertajuk “Prabowo Minta Kabinet Hemat BBM, Pemerintah Kaji WFH bagi ASN”. Data penelitian difokuskan pada 28 tuturan kebetulan yang mengindikasikan adanya pelanggaran kesantunan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode simak dengan teknik catat dan dokumentasi media digital. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka enam maksim kesantunan Leech. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teori dan peningkatan ketekunan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap seluruh maksim kesantunan Leech. Temuan ini membuktikan bahwa isu kebijakan publik di media sosial berbasis video pendek seperti TikTok cenderung memicu respons emosional dan kritik eksplisit yang mengabaikan kepatutan berbahasa di ruang digital.

Kata Kunci: Maksim; Kesantunan; Leech; TikTok; ASN

PRAGMATIC ANALYSIS OF LEECH'S MAXIM VIOLATIONS IN TVONE NEWS TIKTOK COMMENTS ON THE PROPOSED WORK-FROM-HOME POLICY FOR INDONESIAN CIVIL SERVANTS

Ardabilly J. Firdaus^{1}*

Siti Chalimatus Sa'diyah²

Karmila³

Erina Ayu Lestari⁴

Nur Lailiyah⁵

Nusantara PGRI University

e-mail: *ysfbilly1010@gmail.com

Abstract: This study aims to describe the forms of politeness maxim violations based on Leech's theory in the comment section of a tvOneNews TikTok upload regarding the Work From Home (WFH) discourse for State Civil Apparatus (ASN). This research employs a pragmatic approach with a descriptive qualitative design. The data source consists of 4,259 netizens' comments on a political video post titled "Prabowo Asks Cabinet to Save Fuel, Government Reviews WFH for ASN". The research data focuses on 28 selected utterances indicating politeness violations. Data collection was carried out through the observational method utilizing note-taking and digital media documentation techniques. The collected data were analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and drawing conclusions based on the framework of Leech's six politeness maxims. Data trustworthiness was tested through theoretical triangulation and increased persistence of observation. The results indicate violations across all of Leech's politeness maxims. These findings prove that public policy issues on short-video-based social media platforms such as TikTok tend to trigger emotional responses and explicit criticism that disregard proper language decorum in the digital space.

Keywords: Maxim; Politeness; Leech; TikTok; ASN

A. PENDAHULUAN

Pelanggaran etika di media sosial sering diidentifikasi sebagai perilaku yang menyinggung. Kebebasan berinteraksi tanpa tatap muka secara digital sering kali mengharuskan batas-batas dalam berkomunikasi, sementara itu, pemahaman terhadap konteks atau latar komunikasi oleh kedua belah pihak tetap bersifat sentral. Dalam hal ini, kesan berbahasa, baik lisan maupun tulis, penting untuk menjaga martabat mitra tutur. Kesantunan merupakan kontrak percakapan yang menuntut partisipan menggunakan bahasa yang tepat dalam situasi. Kendati demikian, fenomena ketidaksantunan masih sering ditemukan, sehingga pesan yang disampaikan penutur kerap gagal diterima baik.

Fenomena ketidaksantunan ini salah satunya terwujud dalam platform TikTok, yang kini menjadi ruang kontemporer bagi generasi muda untuk mengekspresikan identitas, emosi, dan opini, baik melalui konten video maupun interaksi di kolom komentar. Fenomena tersebut menampilkan paradigma transisi komunikasi yaitu pola lisan tradisional yang terikat pada norma sosial dan kesan kini bergeser ke arah komunikasi digital yang mengutamakan kebebasan berekspresi serta spontanitas. Terkait karakteristik ini, Putri dan Santoso (2023, dalam Malikha, 2025) menjelaskan bahwa media sosial TikTok berperan sebagai arena performatif untuk mengonstruksi citra diri melalui bahasa yang cenderung ekspresif dan emosional.

Realitas kebebasan berekspresi di TikTok saat ini dimulai dengan gejala penurunan kesadaran generasi muda dalam menerapkan norma kesantunan berbahasa saat berinteraksi digital (Wibisono, 2024, dalam Malikha, 2025). Fenomena tanpa batas ini terlihat pada kolom komentar video politik yang berjudul *“Prabowo Minta Kabinet Hemat BBM, Pemerintah Kaji WFH bagi ASN”* yang melanggar pelanggaran maksim kesantunan berupa bentuk sindiran, ejekan, maupun kritik yang tajam dari warganet. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk mengungkap bentuk pelanggaran kesantunan guna mencegah pudarnya etika berkomunikasi di ruang digital. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya kajian pragmatik terkait teori kesantunan Leech dalam konteks komunikasi digital. Dari aspek praktis, hasil kajian ini diproyeksikan sebagai instrumen refleksi bagi pengguna media sosial dalam meningkatkan kesadaran beretika, sehingga mampu menyampaikan gagasan secara lebih bijak dan positif di ranah publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai pelanggaran kesantunan berbahasa di media sosial telah dilakukan dengan berbagai fokus dan objek kajian. Penelitian oleh Elviana et al. (2025) mengkaji pelanggaran kesantunan berbahasa pada kanal YouTube Mama Lela Series dalam konteks hiburan dan dialog antartokoh. Penelitian tersebut lebih berfokus pada tuturan naratif yang terjadi antar pemain, sehingga belum menggambarkan interaksi spontan masyarakat dalam ruang publik digital. Dengan kata lain, objek kajian yang digunakan masih terbatas pada komunikasi yang bersifat terstruktur dalam konten hiburan.

Sementara itu, penelitian Vani & Sabardila (2020) membahas ketidaksantunan berbahasa generasi milenial pada media sosial Twitter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ketidaksantunan muncul melalui penggunaan kata kasar, umpatan, sindiran, ejekan, dan julukan yang merendahkan pihak lain. Penelitian tersebut juga

mengkaji strategi ketidaksantunan positif dan negatif yang digunakan pengguna Twitter dalam berinteraksi. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada strategi ketidaksantunan secara umum dan belum mengklasifikasikan pelanggaran berdasarkan enam maksim kesantunan Geoffrey Leech secara rinci.

Adapun penelitian oleh Insani (2023) menganalisis pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam video siaran langsung Instagram menggunakan teori Brown dan Levinson. Penelitian tersebut menemukan adanya tindak pengancaman muka positif dan negatif dalam komunikasi penutur selama siaran langsung berlangsung. Selain itu, penelitian tersebut lebih memfokuskan kajian pada strategi penyelamatan muka dalam komunikasi langsung sehingga belum mengaitkan fenomena ketidaksantunan dengan komentar politik digital yang berkembang secara cepat dan terbuka pada media sosial berbasis video pendek seperti TikTok.

Berbagai penelitian terdahulu membuktikan bahwa kajian ketidaksantunan di media sosial telah banyak dilakukan, namun analisis yang fokus pada kolom komentar politik di platform video pendek seperti TikTok masih sangat terbatas. Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini, mengingat perkembangan teknologi digital. Secara khusus, teori kesantunan Leech (2014) yang mencakup enam maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, pemufakatan, dan kesimpatian dipilih sebagai kerangka analisis utama (Shofianah et al., 2020) karena dinilai mampu mengklasifikasikan bentuk pelanggaran kesantunan warganet secara rinci dan mendalam. Jika penelitian oleh Vani & Sabardila (2020) lebih menekankan strategi ketidaksantunan secara umum dan penelitian Insani (2023) menggunakan teori Brown dan Levinson, maka kebaruan teoretis penelitian ini secara spesifik memusatkan perhatian pada bentuk pelanggaran setiap maksim kesantunan Leech dalam komunikasi digital.

Selain aspek teoretis, kebaruan penelitian ini juga terletak pada objek dan konteksnya, yakni kolom komentar akun TikTok tvOneNews pada video politik aktual berjudul “Prabowo Minta Kabinet Hemat BBM, Pemerintah Kaji WFH bagi ASN”. Isu kebijakan pemerintah ini memicu respons spontan dari warganet berupa kritik, sindiran, sarkasme, hingga ujaran emosional, sehingga menjadi ruang yang tepat untuk menguji dinamika etika berbahasa saat ini. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk pelanggaran maksim kesantunan, namun juga menyingkap kecenderungan pola ketidaksantunan masyarakat dalam diskursus politik digital. Pada akhirnya, hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru yang signifikan terhadap pengembangan kajian pragmatik siber, khususnya mengenai pelanggaran maksim kesantunan Leech dalam komunikasi politik digital kontemporer.

Berdasarkan observasi pada kolom komentar akun TikTok tvOneNews pada video “Prabowo Minta Kabinet Hemat BBM, Pemerintah Kaji WFH bagi ASN”, terdapat 4.259 komentar warganet. Dari keseluruhan populasi tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada 28 sampel tuturan yang secara jelas mengindikasikan adanya pelanggaran maksim kesantunan akibat dorongan emosional warganet tanpa memedulikan kepatutan berbahasa di ruang publik. Fenomena memudarnya kesantunan berbahasa digital tersebut melatarbelakangi studi ini, yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran maksim kesantunan Leech, mengidentifikasi jenis maksim yang paling sering dilanggar, serta menjelaskan konteks penggunaan tuturan tidak sopan dalam

komunikasi digital warganet. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap bagaimana fenomena pelanggaran kesantunan tersebut mencerminkan realitas perilaku komunikasi masyarakat di media sosial, khususnya pada platform TikTok.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan pragmatik dengan teori kesantunan *Leech* untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran yang terjadi serta memahami konteks penggunaannya. Ayupradani et al. (2021) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang menyajikan data dalam bentuk kumpulan kata, kalimat, paragraf.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kolom komentar unggahan video tiktok TVONE NEWS berjudul “Prabowo Minta Kabinet Hemat BBM, Pemerintah Kaji WFH bagi ASN”. Data penelitian berupa tuturan dalam komentar pengguna yang mengandung pelanggaran maksim kesantunan berdasarkan teori *Leech*. Data tersebut berupa kata, frasa, dan/atau kalimat yang menunjukkan adanya pelanggaran maksim kesantunan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik catat sebagai bagian dari metode simak. Dalam metode ini, peneliti bertindak untuk menyimak tuturan subjek penelitian tanpa melibatkan diri dalam tuturan tersebut, yaitu dengan membaca komentar pada unggahan akun TikTok @TVOne News.

Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: (1) membaca keseluruhan komentar pada akun TikTok @TVOne News, (2) mengidentifikasi dan menandai komentar yang mengandung sarkasme atau bahasa kasar, serta (3) mentranskripsikan komentar yang mengandung sarkasme atau bahasa kasar. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Thalib, 2022). Pada tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang telah terkumpul sesuai kaidah pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan teori *Leech*, yang meliputi maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, pemufakatan, dan kesimpatian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk pemaparan deskriptif, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi strategi teori dan peningkatan ketekunan pengamatan. Triangulasi teori yang diimplementasikan dengan mengonfrontasikan sekaligus menyelaraskan hasil analisis data prinsip kesantunan *Leech* (2014) dengan temuan-temuan pada penelitian terdahulu yang relevan. Di sisi lain, ketekunan pengamatan diwujudkan melalui pembacaan, pencermatan, dan penelaahan data secara berulang serta berkesinambungan. Langkah ini dilakukan demi menjamin kedalaman interpretasi, meminimalkan bias peneliti, serta memperoleh hasil analisis yang konsisten dan akurat.

Tempat penelitian dapat berupa tempat geografis dan nongeografis. Tempat penelitian geografis merupakan lokasi fisik tempat peneliti memperoleh data secara langsung, seperti sekolah, kampus, atau lingkungan masyarakat. Sementara itu, tempat penelitian nongeografis merupakan tempat penelitian yang tidak terikat pada lokasi fisik tertentu, melainkan berada dalam ruang virtual atau media digital. Menurut Rahardi (2022), interaksi bahasa dalam media sosial merupakan bentuk praktik berbahasa dalam ruang siber yang dapat dijadikan objek kajian pragmatik. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai tempat penelitian nongeografis karena interaksi masyarakat terjadi secara virtual melalui ruang digital. Selain itu, Rahim & Muhdina (2021) menyatakan bahwa “penggunaan bahasa pada media sosial dapat dianalisis melalui kajian pragmatik karena memuat berbagai bentuk tuturan dan respons pengguna. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian yang berjudul “Prabowo Minta Kabinet Hemat BBM, Pemerintah Kaji WFH bagi ASN” menggunakan tempat penelitian nongeografis karena data penelitian diperoleh dari kolom komentar akun TikTok tvOne yang merupakan ruang komunikasi digital, bukan lokasi fisik tertentu. Dengan demikian, penelitian ini termasuk penelitian nongeografis karena objek kajiannya berada pada interaksi virtual di media sosial TikTok.

C. PEMBAHASAN

Analisis data pada kolom komentar TikTok TVOne News tentang usulan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), ditemukan berbagai bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa menurut teori Leech. Secara keseluruhan, terdapat 28 data yang mengandung pelanggaran terhadap enam maksim kesantunan, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kederawanan, maksim penghargaan, maksim kesimpatian, maksim kesederhanaan, dan maksim pemufakatan. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial cenderung mengekspresikan pendapat, kritik, maupun ketidaksetujuan secara langsung tanpa memperhatikan aspek kesantunan berbahasa. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran kesantunan umumnya diwujudkan melalui kritik, penilaian negatif, serta penolakan terhadap kebijakan maupun pihak yang menjadi objek pembahasan.

Tabel 1. Tabel Tabulasi

No.	Jenis Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa	Kategori	Jumlah data
1.	Maksim Kebijaksanaan	Menunjukkan sifat negatif (sindiran dan kecurigaan)	1
		Berpotensi memberikan kerugian bagi mitra tutur	1
2.	Maksim Dermawan	Mengutamakan keuntungan pribadi dan golongan	2
3.	Maksim Penghargaan	Menyerang Kapabilitas	6

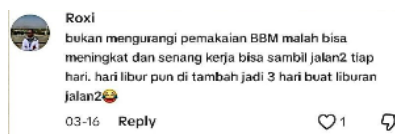
	Penghakiman Langsung	4
4. Maksim Kesimpatian	Antipati	2
	Penentangan	3
5. Maksim Kesederhanaan	Memaksimalkan Kritik	3
6. Maksim Pemufakatan	Ketidaksetujuan atas pandangan mitra tutur	6
Total data		28

Hasil analisis data pada kolom komentar TikTok tvOne News tentang “Prabowo Minta Kabinet Hemat BBM, Pemerintah Kaji WFH bagi ASN”, ditemukan adanya pelanggaran terhadap enam maksim kesantunan berbahasa menurut teori Leech, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kederawanan, maksim penghargaan, maksim kesimpatian, maksim kesederhanaan, dan maksim pemufakatan. Pelanggaran tersebut ditunjukkan melalui penggunaan bahasa yang bernada sindiran, ejekan, kritik langsung, tuduhan, serta ungkapan emosional yang disampaikan tanpa mempertimbangkan kesantunan dalam komunikasi digital.

Berdasarkan keseluruhan data, pelanggaran maksim yang paling dominan ditemukan dalam bentuk kritik langsung, sindiran, dan penggunaan bahasa emosional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa komunikasi di media sosial cenderung dilakukan secara spontan tanpa mempertimbangkan prinsip kesantunan berbahasa. Hal ini membuktikan bahwa media sosial, khususnya TikTok, menjadi ruang komunikasi digital yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk pelanggaran kesantunan dalam interaksi antar pengguna.

1. Maksim Kebijaksanaan

Data 01



Konteks: akun @Roxi menuliskan komentar pada video TikTok milik akun @TvOneNews mengenai usulan WFH bagi ASN demi mengurangi penggunaan BBM. Tuturan tersebut menunjukkan ketidaksetujuan dengan usulan yang diujarkan dan sikap negatif berupa tuduhan dan sindiran terhadap ASN.

Data 01 bentuk pelanggaran maksim kebijaksanaan karena penutur tidak berupaya meminimalkan kerugian bagi pihak lain, melainkan justru menyampaikan tuduhan dan sindiran. Tuturan seperti “*malah bisa meningkat*” dan “*senang kerja bisa sambil jalan-jalan*” mengandung implikatur negatif yang merendahkan serta menggeneralisasi bahwa kebijakan tersebut disalahgunakan. Hal ini menunjukkan sikap tidak santun karena

penutur menyampaikan asumsi tanpa dasar yang jelas dan berpotensi merugikan citra pihak yang dituju di ruang publik.

Data 02



Konteks: pengguna bernama @dpfzstore memberikan komentar pada video TikTok akun @TvOneNews dan memberikan sugesti pada Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak uang agar masalah yang dibicarakan terselesaikan. Namun, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lawan bicara, dalam konteks ini yaitu Presiden Republik Indonesia dan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Tuturan tersebut termasuk pelanggaran maksim kebijaksanaan karena, menghendaki penutur menunjukkan niat baik dalam memberikan keuntungan atau manfaat kepada mitra tuturnya, sementara sugesti yang diberikan dalam komentar akun @dpfzstore berpotensi merugikan pihak lawan bicara karena pencetakan uang berlebih yang tidak sebanding dengan pertumbuhan barang dan jasa justru akan memicu inflasi. Bukti linguistik terlihat pada frasa “*buat uang yang banyak*” dan ungkapan “*ojo repot pak*” menunjukkan kesan menggampangkan masalah yang sedang dibicarakan. Penggunaan kata “*wkwk*” juga memperkuat nuansa meremehkan dalam komentar tersebut. Dengan demikian, data tersebut melanggar maksim kebijaksanaan karena penutur tidak menunjukkan niat baik dan berpotensi merugikan pihak lain.

2. Maksim Kedermawanan

Data 03



Konteks: komentar yang diberikan oleh @Peter Sugiharto pada video TikTok akun @TvOneNews mengenai usulan WFH bagi ASN menunjukkan desakan halus kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan penghasilan demi mengimbangi naiknya harga bahan bakar dan bahan makanan.

Data 03 memiliki kesamaan dengan lima data lain yang ditemukan mengenai pelanggaran maksim kedermawanan tersebut. Maksim kedermawanan menghendaki penutur tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Penutur diharap tidak terlalu mementingkan keuntungan pribadi dan bersedia menanggung kerugian demi kenyamanan atau keuntungan mitra tutur. Namun, pada data tersebut, penutur lebih menonjolkan tuntutan memperbesar keuntungan bagi dirinya dan kelompok pekerja.

Bukti linguistik terlihat pada frasa “*penghasilan di naikan juga dong pak bos*” yang menunjukkan tuntutan agar pendapatan dinaikkan sebagai konsekuensi dari kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, penggunaan kata “*dong*” mempertegas nada desakan kepada pihak pemerintah atau atasan. Dengan demikian, tuturan tersebut melanggar

maksim kedermawanan karena penutur lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan semua pihak, termasuk lawan bicara.

3. Maksim Penghargaan

Data 04



Konteks: Komentar tersebut disampaikan oleh @Mul Yani sebagai tanggapan terhadap unggahan yang membahas kinerja pemerintah. Penutur mengkritik kemampuan pemerintah dalam mengelola negara dengan menyatakan bahwa pemerintah terlihat sudah tidak berkompeten dalam mengemban amanah dan tanggung.

Pada data 04 bentuk pelanggaran maksim penghargaan karena penutur tidak berupaya memberikan penghargaan atau penilaian positif kepada pihak yang menjadi sasaran tuturan. Sebaliknya, penutur secara langsung menyampaikan penilaian negatif dengan menyatakan bahwa pihak tersebut tidak mampu mengelola negara. Dalam maksim penghargaan, seseorang diharapkan meminimalkan bentuk pelanggaran dan memaksimalkan pengakuan positif terhadap pihak lain agar komunikasi berlangsung secara santun. Namun, tuturan tersebut justru menonjolkan kekurangan dan ketidakmampuan pihak yang dibicarakan tanpa disertai bentuk apresiasi atau kritik yang lebih halus. Oleh karena itu, tuturan tersebut termasuk sebagai pelanggaran maksim penghargaan karena memaksimalkan celaan dan berpotensi merendahkan citra pihak yang menjadi objek pembicaraan.

Data 05



Konteks: @napi rum sebagai tanggapan terhadap unggahan yang membahas kinerja, kebijakan, atau kepemimpinan seorang pejabat, seperti presiden atau pemerintah. Penutur menilai bahwa pihak yang dimaksud tidak optimal dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga menyarankan agar pihak tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Tuturan tersebut muncul dalam konteks kritik terhadap kinerja pemimpin yang dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat.

Data 05 termasuk pelanggaran maksim penghargaan karena penutur secara langsung merendahkan kemampuan pihak yang dibicarakan. Tuturan tersebut tidak menunjukkan sikap menghargai, melainkan menekankan kecelaan terhadap mitra tutur melalui ungkapan yang bernada menyerang. Dalam prinsip kesantunan Leech, bentuk tuturan seperti ini termasuk tindakan yang memaksimalkan celaan kepada orang lain.

Bukti linguistik terlihat pada frasa “*tidak mampu*” yang menunjukkan penilaian negatif terhadap kemampuan seseorang, sedangkan kalimat “*undur diri saja*” mengandung desakan yang bernada meremehkan. Penggunaan huruf kapital juga mempertegas emosi dan tekanan dalam komentar tersebut.

4. Maksim Kesimpatian

Data 06



Konteks: akun @Bramlot memberikan komentar pada video TikTok milik akun @tvonenews yang membahas tentang usulan WFH bagi ASN. Komentar tersebut merupakan respon kekesalan sekaligus bentuk antipati terhadap kebijakan Pak Prabowo saat berpidato.

Tuturan data 06 termasuk pelanggaran maksim kesimpatian karena penutur menunjukkan antipati secara langsung terhadap tokoh yang dibicarakan. Dalam maksim kesimpatian, penutur seharusnya mengurangi rasa benci atau penolakan terhadap orang lain.

Bukti linguistik terlihat pada kata “*muak*” yang menunjukkan rasa jijik dan ketidaksukaan secara eksplisit. Selain itu, frasa “*nyesel milih beliau*” memperlihatkan penyesalan sekaligus penolakan terhadap pemimpin yang dipilih. Dengan demikian, komentar tersebut mencerminkan sikap antipati terhadap pihak lain sehingga melanggar maksim kesimpatian.

Data 07



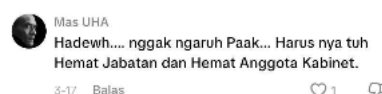
Konteks: akun @Medy Ansyah memberikan komentar pada video TikTok milik akun @tvonenews yang membahas tentang usulan WFH bagi ASN. Komentar tersebut menunjukkan respon penentangan terhadap kebijakan yang disampaikan pada video.

Berdasarkan data 07 termasuk pelanggaran maksim kebijaksanaan karena penutur menunjukkan prasangka negatif terhadap program pemerintah. Hal itu tampak pada ungkapan “*menguras anggaran negara*” yang memberikan penilaian negatif terhadap program MBG.

Selain itu, frasa “*buat beli stok BBM*” menunjukkan bahwa penutur lebih mendukung pengalihan dana program ke sektor lain. Tuturan ini mengandung kritik dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah sehingga tidak mencerminkan niat baik kepada mitra tutur.

5. Maksim Kesederhanaan

Data 08



Konteks: Komentar tersebut disampaikan oleh akun @Mas UHA sebagai tanggapan terhadap unggahan yang membahas kebijakan pemerintah. Penutur menilai bahwa tindakan yang sedang dibahas tidak memberikan pengaruh yang berarti dan menyarankan agar pemerintah lebih berfokus pada penghematan jabatan serta jumlah anggota kabinet.

Pada data 08, ditemukan adanya pelanggaran maksim kesederhanaan, yang memiliki kesamaan pola dengan dua data lain dalam penelitian ini. Dalam maksim kesederhanaan, penutur yang diharapkan dapat meminimalkan pujian dan memaksimalkan kecaman terhadap diri sendiri agar tetap rendah hati. Namun, melalui ungkapan “*nggak ngaruh Paak*”, penutur secara tidak langsung menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tahu atau lebih unggul dibandingkan pihak pemerintah. Sikap kurang rendah hati ini dipertegas ketika penutur menambahkan kritik yang mendikte agar pemerintah melakukan penghematan jabatan dan anggota kabinet. Dengan menyampaikan penilaian yang bernada menggurui tanpa adanya sikap santun atau penghormatan terhadap otoritas, tuturan tersebut menonjolkan keangkuhan pendapat pribadi penutur. Oleh karena itu, komentar tersebut dipotong sebagai pelanggaran maksim kesederhanaan karena penutur gagal meminimalkan pujian atau rasa superioritas atas pandangan dirinya sendiri.

6. Maksim Pemufakatan

Data 09



Konteks: Komentar tersebut disampaikan oleh akun @Icha Azizah, M.Si sebagai tanggapan terhadap unggahan yang membahas kebijakan pemerintah terkait penghematan anggaran dan konsumsi BBM. Penutur menyampaikan beberapa usulan, yaitu menghentikan program MBG, menyetarakan tunjangan DPR dengan PNS, serta mengganti mobil dinas dengan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar.

Pada data 09 ditemukan adanya kesamaan pelanggaran pada 5 data lainnya. Pelanggaran maksim pemufakatan karena penutur menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau kondisi yang sedang berlaku dan mengajukan alternatif kebijakan menurut pandangannya sendiri. Melalui pernyataan yang berbentuk daftar usulan, penutur secara implisit menolak kebijakan yang ada dengan menyarankan penghentian program MBG, pengurangan kesenjangan tunjangan, dan penggunaan kendaraan dinas yang lebih hemat BBM. Dalam maksim pemufakatan, penutur diharapkan meminimalkan ketidaksepakatan dan memperbesar kesepahaman dengan pihak lain. Namun, tuturan tersebut justru menonjolkan perbedaan pandangan terhadap kebijakan yang sedang diterapkan tanpa menunjukkan persetujuan terhadap kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, komentar tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran maksim pemufakatan karena menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pandangan atau kebijakan pihak lain.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan 28 data pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa pada kolom komentar TikTok TVOne News terkait unggahan “Prabowo Minta Kabinet Hemat BBM, Pemerintah Kaji WFH bagi ASN”. Pelanggaran tersebut mencakup enam maksim kesantunan Leech, yaitu maksim kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesimpatian, kesederhanaan, dan pemufakatan. Dari keseluruhan data, pelanggaran maksim penghargaan menjadi kategori yang paling dominan dengan jumlah sepuluh (10) data. Dominasi pelanggaran pada maksim penghargaan menunjukkan bahwa pengguna media sosial cenderung menyampaikan kritik secara langsung melalui ujaran yang merendahkan, mengejek, menghakimi, dan menyerang kapabilitas pihak yang menjadi sasaran komentar. Bentuk sarkasme ini diwujudkan melalui konstruksi kalimat bertingkat yang diawali dengan kesan positif, namun diakhiri dengan kesan negatif bagi pihak lain. Karakteristik ini terjadi memicu tabrakan yang tajam antara makna harfiah teks dengan maksud pragmatis yang sesungguhnya dikehendaki oleh penutur (Lailiyah, 2021).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa isu politik dan kebijakan publik sering kali memunculkan respons emosional yang mendorong pengguna mengabaikan prinsip kesantunan dalam berkomunikasi. Hal tersebut terlihat dari dominannya komentar yang berisi kritik langsung, sindiran, ejekan, dan penilaian negatif terhadap pihak yang menjadi sasaran tuturan. Simpulan ini sejalan dengan simpulan studi yang dilakukan oleh Sulistianah, Nurhasanah, dan Rohbiah (2025) yang menemukan bahwa komentar warganet terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di media sosial didominasi oleh pelanggaran kesantunan, sarkasme, dan ungkapan emosional. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada konteks komunikasi digital yang terbuka, warganet cenderung merespons isu-isu politik dengan bahasa yang mencerminkan sikap kritis sekaligus emosional sehingga berpotensi mengabaikan norma kesantunan berbahasa.

Maksim penghargaan menuntut penutur untuk mereduksi bentuk celaan terhadap pihak lain sekaligus mengeskalasi penghargaan kepada mitra tutur. Namun, dalam penelitian ini ditemukan 10 data komentar yang secara eksplisit menunjukkan kecaman terhadap kemampuan dan kinerja pemerintah. Bentuk tuturan tersebut menunjukkan bahwa serangan personal yang berpotensi merendahkan citra pihak yang dikritik. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Assidik (2024) yang menemukan bahwa pelanggaran maksim penghargaan mendominasi kolom komentar Instagram @aniesbaswedan karena warganet lebih sering menggunakan ujaran bernada merendahkan dan menghakimi ketika menanggapi isu politik.

Selain itu, pelanggaran maksim pemufakatan juga ditemukan dalam jumlah yang cukup tinggi, yaitu enam data. Pelanggaran ini ditandai dengan munculnya komentar yang secara langsung menolak atau menentang kebijakan pemerintah, seperti usulan penghentian program tertentu, kritik terhadap subsidi BBM, hingga penolakan terhadap kebijakan WFH bagi ASN. Dalam teori Leech, maksim pemufakatan menekankan pentingnya memaksimalkan kesepakatan dan meminimalkan pertentangan dalam interaksi sosial. Akan tetapi, komentar-komentar yang ditemukan justru memperlihatkan dominasi ketidaksetujuan yang diekspresikan secara terbuka. Hal ini dapat dipahami karena media sosial menyediakan ruang yang memungkinkan pengguna menyampaikan kritik tanpa batasan formal sebagaimana dalam komunikasi tatap muka. Temuan ini

mendukung penelitian Ayupradani dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa pelanggaran maksim pemufakatan pada kolom komentar banyak diwujudkan melalui bentuk penolakan, sanggahan, dan pertentangan terhadap pendapat atau kebijakan tertentu.

Pelanggaran maksim kesimpatian ditemukan sebanyak lima data yang didominasi oleh bentuk antipati dan penentangan terhadap tokoh maupun kebijakan pemerintah. Komentar menunjukkan adanya rasa kecewa, jenuh, dan ketidaksukaan yang diungkapkan secara terbuka. Dalam pandangan Leech, maksim kesimpatian mengharuskan penutur memaksimalkan simpati dan meminimalkan antipati terhadap orang lain. Namun, data penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan publik lebih sering diekspresikan dalam bentuk antipati dibandingkan empati. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang digital sering menjadi sarana pelampiasan emosi pengguna dan selaras dengan temuan Ningsih & Surawan (2025) penelitiannya yang menyatakan bahwa mengungkapkan perasaan di media sosial dianggap sebagai cara yang cukup efektif untuk meredakan emosi atau sekadar menyalurkan apa yang dirasakan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Amil dan Ramdhani (2023) yang menemukan bahwa warganet Instagram cenderung menggunakan ekspresi emosional bernada negatif ketika menanggapi isu yang menimbulkan kontroversi.

Pelanggaran maksim kesederhanaan ditemukan sebanyak tiga data dengan kecenderungan berupa pemaksimalan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam teori Leech, maksim kesederhanaan menuntut penutur untuk tidak meninggikan diri atau penilaiannya sendiri. Akan tetapi, ditemukan komentar yang memperlihatkan keyakinan penutur bahwa pandangannya lebih tepat dibandingkan kebijakan yang sedang diterapkan pemerintah. Penutur tidak hanya mengkritik, tetapi juga secara implisit menempatkan dirinya sebagai pihak yang lebih memahami persoalan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kritik di media sosial sering disampaikan tanpa mempertimbangkan prinsip kerendahan hati dalam berbahasa.

Pada maksim kebijaksanaan, ditemukan dua data yang menunjukkan adanya sindiran, prasangka, dan kecurigaan terhadap kebijakan pemerintah. Bentuk pelanggaran ini terlihat dari tuturan yang berpotensi merugikan pihak lain melalui penilaian negatif tanpa dasar yang jelas. Dalam kerangka teori Leech, maksim kebijaksanaan menitikberatkan pada urgensi mereduksi beban atau kerugian bagi pihak lain sekaligus mengeskalasi kemaslahatan bagi mitra tutur. Namun, komentar yang ditemukan justru mengandung prasangka yang dapat memperburuk citra pihak yang dibicarakan. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Usman & Chaidir (2025) yang memperlihatkan bahwa situasi politik juga memengaruhi gaya kesantunan warganet. Komentar-komentar yang muncul pasca kebijakan publik seperti kenaikan harga BBM, PPKM, atau isu vaksin sering kali lebih ekspresif dan bahkan sarkastik.

Sementara itu, pelanggaran maksim kedermawanan ditemukan dalam bentuk komentar yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan kepentingan bersama. Penutur lebih menonjolkan manfaat yang diinginkan bagi dirinya atau kelompoknya dan kurang mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Dalam perspektif Leech, maksim dermawan mengharuskan penutur meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Oleh karena itu,

pelanggaran pada maksim ini menunjukkan rendahnya orientasi kolektif dalam sebagian komentar yang dianalisis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa media sosial merupakan ruang komunikasi yang rentan terhadap munculnya ketidaksantunan berbahasa. Karakteristik komunikasi digital yang bersifat cepat, terbuka, dan minim kontrol sosial menyebabkan pengguna lebih berani mengungkapkan kritik secara langsung tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vani dan Sabardila (2020) dalam artikel *“Ketidaksantunan Berbahasa Generasi Milenial dalam Media Sosial Twitter”* yang menyatakan bahwa anonimitas dan minimnya interaksi tatap muka mendorong pengguna media sosial menggunakan bahasa yang lebih agresif dan kurang santun. Selain itu, penelitian Malikha (2025) berjudul *“Fenomena Perubahan Etika Berbahasa Remaja dalam Komentar TikTok: Analisis Pragmatik Kritis”* juga menunjukkan bahwa TikTok telah menjadi ruang yang memperlihatkan pergeseran etika berbahasa, terutama dalam bentuk kritik dan ekspresi ketidaksetujuan yang disampaikan secara langsung. Temuan-temuan tersebut menguatkan hasil penelitian ini bahwa kebebasan berekspresi di media sosial perlu diimbangi dengan kesadaran untuk tetap menerapkan prinsip kesantunan berbahasa agar komunikasi publik berlangsung secara lebih sehat, konstruktif, dan bertanggung jawab.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolom komentar TikTok TVOne News pada unggahan berjudul *“Prabowo Minta Kabinet Hemat BBM, Pemerintah Kaji WFH bagi ASN”* mengandung berbagai bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa berdasarkan teori kesantunan Geoffrey Leech. Dari 28 data yang dianalisis, ditemukan pelanggaran terhadap enam maksim kesantunan, yaitu maksim kebijaksanaan (2 data), kedermawanan (4 data), penghargaan (10 data), kesimpatian (5 data), kesederhanaan (3 data), dan pemufakatan (4 data). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran maksim penghargaan merupakan bentuk ketidaksantunan yang paling dominan. Pelanggaran ini ditandai oleh penggunaan ujaran yang bernada merendahkan, mengejek, menghakimi, serta menyerang kemampuan pihak yang menjadi sasaran komentar.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa komunikasi pada ruang digital, khususnya media sosial TikTok, cenderung mendorong pengguna untuk menyampaikan pendapat secara spontan dan emosional. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pengguna mengabaikan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa ketika menanggapi isu politik dan kebijakan publik. Bentuk pelanggaran yang ditemukan umumnya diwujudkan melalui sindiran, kritik langsung, prasangka negatif, penolakan terhadap kebijakan, serta penggunaan diksi yang bersifat ofensif.

Memperkuat jalinan teori dan empiris dari studi-studi terdahulu yang menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap munculnya ketidaksantunan berbahasa akibat minimnya kontrol sosial dan tidak adanya interaksi tatap muka secara langsung. Namun demikian, penelitian ini memiliki kekhasan karena mengungkap pelanggaran keenam maksim kesantunan Leech secara rinci dalam konteks diskursus politik digital yang berkembang di platform TikTok. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan komunikasi digital tidak hanya menghadirkan

kebebasan berekspresi, namun juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga etika dan kesantunan berbahasa di ruang publik virtual. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran berbahasa bagi pengguna media sosial agar penyampaian kritik, pendapat, maupun ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan tetap dilakukan secara santun, argumentatif, dan bertanggung jawab. Kesantunan berbahasa menjadi aspek penting yang perlu dipertahankan guna menciptakan iklim komunikasi digital yang lebih sehat, konstruktif, dan menghargai pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amil, F.S.N. & Ramdhani, I.S., 2023. Analisis kesantunan berbahasa warganet pada kolom komentar postingan akun Instagram @mastercorbuzier. *Jurnal Education and Development*, 11(2), pp.280–286.
- Ayupradani, N.T., Kartini, E.R., Minastiti, S. & Pratiwi, D.R., 2022. Pelanggaran bidal kesantunan berbahasa warganet dalam kolom komentar Twitter @Fiersabesari. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 18(1), pp.16–25.
- Elviana, M., Furqon, H. & Ihsan, B., 2025. Pelanggaran kesantunan berbahasa pada channel YouTube “Mama Lela Series” episode 412 ‘Patrol Keliling Satu Kampung’. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 5(3), pp.2777–2787.
- Insani, D.M., 2023. Pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam video siaran langsung Bunda Corla: Kajian pragmatik Brown dan Levinson. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Leech, G.N., 2014. *The Pragmatics of Politeness*. Oxford: Oxford University Press.
- Lailiyah, N., 2021. Tindak Tutur Ekspresif Meminta Maaf Terpidana Korupsi di Indonesia. *PRASASTI: Jurnal Linguistik*, 6 (2), hlm.215-225.
- Rahim, A.R. & Muhdina, D., 2021. Penggunaan bahasa pada media sosial (medsos): Studi kajian pragmatik. *Gema Wiralodra*, 12(2), pp.305–319.
- Thalib, M.A., 2022. Pelatihan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), pp.23–33.
- Usman, U. & Chaidir, M., 2025. Kesantunan berbahasa warganet Indonesia pada kolom komentar Instagram Joko Widodo. *Sawerigading*, 31(1).
- Vani, M.A. & Sabardila, A., 2020. Ketidaksantunan berbahasa generasi milenial dalam media sosial Twitter. *Pena Literasi*, 3(2), pp.90–102.

